



## Peran Hamas dalam Perlawanan dan Diplomasi: Dinamika Politik Islam dalam Upaya Pembebasan Palestina

### *Hamass' Role in Resistance and Diplomacy: Dynamics of Islamic Politics in the Efforts to Liberate Palestine*

Mutiah<sup>1\*</sup>, Aulia Mella Nooraisya<sup>2</sup>, Try Rahmawati<sup>3</sup>, Haykal Gunanda Ahmad<sup>4</sup>, Nur Destry Fauziah<sup>5</sup>, Hisny Fajrussalam<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pendidikan Indonesia, mutiahmut25@upi.edu

<sup>2</sup>Universitas Pendidikan Indonesia, auliamella.13@upi.edu

<sup>3</sup>Universitas Pendidikan Indonesia, tryrahmawati20@upi.edu

<sup>4</sup>Universitas Pendidikan Indonesia, haykalgunanda@upi.edu

<sup>5</sup>Universitas Pendidikan Indonesia, nurdestryf16@upi.edu

<sup>6</sup>Universitas Pendidikan Indonesia, hfajrussalam@upi.edu

\*Corresponding Author: E-mail: mutiahmut25@upi.edu

#### *Artikel Penelitian*

#### **Article History:**

Received: 27 Feb, 2025

Revised: 29 Apr, 2025

Accepted: 30 Apr, 2025

#### **Kata Kunci:**

Hamas, Palestina Israel Islam  
Politics Diplomacy

#### **Keywords:**

Hamass, Palestina Israel  
Islam Politics Diplomacy

**Doi: 10.56338/jks.v8i4.7282**

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengkaji peran Hamas sebagai bentuk perlawanan dan dinamika politik islam yang terlibat dalam upaya pembebasan Palestina. Metode yang penulis gunakan adalah literature review dengan menganalisis berbagai sumber seperti artikel jurnal, buku, website, etc. Hasil dari penelitian ini adalah Hamas merupakan salah satu organisasi intra Islam yang dianggap sebagai simbol perlawanan rakyat palestina terhadap penduduk Israel. Salah satu strategi perlawanan Hamas yang paling menonjol adalah perang gerilya yang digunakan sebagai upaya untuk menghadapi keunggulan militer Israel. Perjuangan Hamas untuk membebaskan Palestina melalui dua jalur, yaitu jalur diplomasi dan jalur militer. Dalam perlawanannya, Hamas banyak berurusan dengan pihak lain, baik itu pihak yang pro maupun kontra. Hamas sering dianggap sebagai organisasi teroris oleh beberapa pihak karena perlawanannya yang keras, sehingga membatasi jalur diplomasi mereka di jalur internasional. Dengan kondisi yang seperti ini, tentu saja Hamas menghadapi dilema antara mempertahankan strategi perlawanan bersenjata atau mengadopsi pendekatan politik yang lebih moderat demi mengurangi isolasi internasional dan meningkatkan legitimasi pemerintahan mereka di Gaza.

#### **ABSTRACT**

*This study aims to examine the role of Hamas as a form of resistance and the dynamics of Islamic politics involved in the effort to liberate Palestine. The method used by the author is a literature review by analyzing various sources such as journal articles, books, websites, etc. The results of this study are that Hamas is one of the intra-Islamic organizations that is considered a symbol of the resistance of the Palestinian people against the Israeli population. One of Hamas's most prominent resistance strategies is guerrilla warfare which is used as an effort to confront Israel's military superiority. Hamas' struggle to liberate Palestine is through two channels, namely diplomacy and military channels. In its resistance, Hamas has had many dealings with other parties, both pro and contra parties. Hamas is often considered a terrorist organization by several parties because of its fierce resistance, thus limiting their diplomatic channels on international channels. With conditions like this, of course Hamas faces a dilemma between maintaining an armed resistance strategy or adopting a more moderate political approach in order to reduce international isolation and increase the legitimacy of their government in Gaza.*

## PENDAHULUAN

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik geopolitik yang kompleks dan berkepanjangan dalam sejarah modern. Konflik ini telah berlangsung lama hingga sekarang mencapai tujuh dekade, menyebabkan ketegangan yang tiada hentinya di Timur Tengah serta menarik perhatian dunia internasional. Akar dari konflik ini dapat ditelusuri kembali pada awal abad ke-20 ketika terjadinya peningkatan imigrasi bangsa Yahudi ke Palestina yang saat itu berada di kekuasaan kekaisaran Ottoman, dan kemudian berhasil direbut kuasa oleh Inggris setelah Perang Dunia 1. Ketegangan bertambah memuncak ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1947 membagi wilayah Palestina menjadi dua bagian, yaitu satu untuk bangsa Yahudi dan satu untuk orang Arab Palestina. Tentu saja keputusan ini memicu perlawanan dari masyarakat Arab Palestina dan negara-negara Arab lainnya, karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yaitu mengesampingkan hak-hak historis penduduk asli Palestina (Singh, 2022).

Sejak berdirinya Israel pada tahun 1948, perang dan konflik terus terjadi antara Israel dan Palestina. Israel terus menerus secara bertahap memperluas wilayah kekuasaannya melalui berbagai perang dan kebijakan pemukiman, yang mengakibatkan hilangnya sebagian besar tanah orang-orang Palestina. Tidak hanya itu, tindakan militer yang dilakukan Israel seperti pendudukan Tepi Barat dan Jalur Gaza, serta blokade terhadap wilayah-wilayah ini, telah mengakibatkan penderitaan yang mendalam dan terus menerus bagi rakyat Palestina. Konflik ini bukan sekedar bersifat militer, tetapi juga pertempuran politik, ideologis, dan agama yang lebih luas di kawasan tersebut (Balal, 2022). Selain itu, Israel juga melancarkan serangan-serangan besar yang meliputi pengeboman udara dan invasi darat, yang dipercayai sebagai tindakan pemberantasan terorisme, tetapi dikategorikan sebagai pembersihan etnis oleh beberapa pihak. Serangan ini dilakukan tanpa pandang bulu, targetnya meliputi warga sipil. Sehingga mengakibatkan kehancuran infrastruktur sipil seperti sekolah, masjid, rumah sakit, dan sebagainya (Ak, 2024).

Sebagai bentuk tanggapan terhadap kondisi yang semakin memburuk tiap harinya, muncul berbagai kelompok perlawanan Palestina yang memperjuangkan dan menekadkan diri demi kemerdekaan dan hak-hak rakyat Palestina. Salah satu kelompok yang memiliki pengaruh besar adalah Hamas (Harakat al-Muqawama al-Islamiyya) yang memiliki arti Gerakan Perlawanan Islam. Didirikan pada tahun 1987 di tengah gelombang Intifada pertama. Pada mulanya, Hamas merupakan cabang dari Ikhwanul Muslimin yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Tetapi, seiring dengan meningkatnya ketegangan dan ketidakpuasan terhadap jalur diplomasi yang dilalui oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Hamas berkembang menjadi organisasi perlawanan yang lebih bersifat militer dan politik. Hal ini juga didukung dengan kemenangan Hamas dalam pemilu tahun 2006 yang mengubahnya menjadi kekuatan politik utama di Palestina. Hamas bukan hanya terlibat dalam aksi-aksi perlawanan, tetapi juga berperan penting terkait diplomasi dan politik internasional, meskipun seringkali mendapatkan kritik dan pembatasan dari komunitas internasional karena dipandang buruk dalam metode-metode yang mereka gunakan dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina (Sari, 2020; Faeq 2020).

Peran Hamas terhadap perlawanan Palestina dapat dipandang sebagai upaya untuk mempertahankan identitas dan kedaulatan bangsa Palestina yang terancam dan sengsara atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Israel. Selain itu, Hamas juga memperlihatkan dinamika politik Islam yang berkembang di kawasan Timur Tengah, di mana gerakan Islam tidak hanya terlibat dalam kegiatan keagamaan, tetapi aktif juga dalam konstelasi politik Internasional. Keberadaan Hamas banyak mengundang *pro kontra* atau perdebatan internasional yang tajam. Ada sebagian yang beranggapan bahwa Hamas adalah organisasi teroris, dan ada pula yang menganggap mereka sebagai pembela hak-hak bangsa Palestina yang sah.

Hamas telah berhasil memperluas jaringan di dunia Arab dan internasional, serta memperoleh dukungan dari negara-negara lain dan beberapa kelompok. Di sisi lain, kebijakan-kebijakan yang dilakukan Hamas, seperti menggunakan kekerasan yaitu dalam bentuk serangan roket dan aksi militer

lainnya yang membahayakan sering kali mendapatkan kecaman dari masyarakat internasional, mereka menganggap bahwa itu bisa mengganggu perdamaian dan keamanan internasional. Konflik ini, yang bermula dipicu karena ketidakadilan dalam pembagian wilayah, telah berubah menjadi pertempuran ideologis dan politik yang jauh lebih kompleks, di mana Hamas berperan dalam memperjuangkan kebebasan Palestina tidak dapat dipisahkan dari dinamika yang lebih luas, termasuk peran negara-negara besar dan organisasi internasional.

Berdasarkan pembahasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Hamas sebagai bentuk perlawanan dan dinamika politik islam yang terlibat dalam upaya pembebasan Palestina. Fokus utama dari penelitian ini yaitu untuk memaparkan bagaimana peran Hamas telah memainkan peran dalam memperjuangkan kebebasan bangsa Palestina, baik melalui aksi militer maupun diplomasi. Selain itu, penelitian ini juga mencoba untuk mengkaji bagaimana pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Hamas berbeda dari peran-peran politik lain di Palestina seperti Fatah dan LPO.

## **METODE**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *literature review* (studi pustaka) dan analisis dokumen. Metode ini melibatkan proses membaca dan mempelajari berbagai sumber yang relevan untuk mengumpulkan informasi dan pemahaman yang mendalam mengenai topik yang diteliti. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami peran Hamas dalam perlawanan dan diplomasi serta bagaimana organisasi ini berinteraksi dengan elemen-elemen lain di Palestina dan dunia Internasional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah dan Ideologi Hamas**

Pada awalnya Hamas merupakan organisasi yang berfokus pada kegiatan sosial-keagamaan dengan nama lain yaitu Ikhwanul Muslimin. Menurut Sari, 2020 Hamas berada di tengah Intifada, Namun, seperti organisasi lainnya yang menarik basis sosial tertentu, Hamas bukanlah fenomena yang muncul begitu saja. Hamas berkembang melalui pengalaman sejarah rakyat Palestina yang hidup di bawah pendudukan, dan akhirnya berasal dari gagasan perlawanan yang dibentuk serta diidentifikasi dengan gerakan Ikhwanul Muslimin. (Menurut Prabowo, 2013 dalam Rahman, 2020) Ikhwanul Muslimin merupakan sebuah organisasi yang berasal dari Mesir, yang kemudian memiliki cabang di Palestina pada tahun 1946. Hamas merupakan cabang dari gerakan Ikhwanul Muslimin yang berdiri pada 14 Desember 1987. Menurut Karatas dkk, 2019 Hamas merupakan organisasi yang lebih terarah dan tertib untuk mencapai satu tujuan. Akar gerakan Hamas–singkatan dari Harakah al-Muqawwamah al-Islamiyyah (Gerakan Perlawanan Islam), Hamas menganggap perlawanan Palestina sebagai kewajiban agama dan berjuang melawan Israel di garis depan, dengan menegaskan bahwa wilayah yang diduduki tidak dapat ditinggalkan. Seiring waktu, kelompok ini menjadi salah satu aktor utama dalam persoalan Palestina.

(Menurut Irwan Abdallah, Setyawati, & Mutiah, 2015 dalam Rahman, 2020). Hamas menilai bahwa usaha-usaha diplomasi yang telah dilakukan oleh beberapa gerakan perlawanan Palestina terhadap Israel hanya merugikan rakyat Palestina saja dan malah memperkuat posisi Israel, selain itu Hamas tidak setuju dengan strategi dan cara yang dilakukan oleh Fatah dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina. Menurut Hammaduddin, 2021 Hamas memperoleh dukungan besar dari masyarakat selama Intifada Pertama dan Kedua karena sikap kerasnya terhadap Israel serta program kesejahteraan sosialnya yang mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Otoritas Palestina. Hamas yang bercita-cita untuk mendirikan sebuah negara Islam Palestina yang merdeka berdaulat, memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan Palestina dalam kerangka “Pan Islamisme” yang artinya seluruh umat islam di dunia harus terlibat dalam melawan kekuatan zionisme. Hamas tidak hanya melihat perjuangan Palestina sebagai upaya nasional, tetapi juga sebagai kewajiban agama. Gerakan ini

menggabungkan elemen spiritual dan politik, menjadikan Islam sebagai dasar perlawanan terhadap Zionisme (Awwad, 2020).

Hamis merupakan gerakan islam Sunni dan nasionalisme palestina yang menentang wilayah pendudukan Zionis di wilayah tersebut. Gerakan ini percaya bahwa kebangkitan mereka adalah titik masuk utama untuk tujuan “Membebaskan seluruh palestina dari sungai ke laut”. Gerakan ini semakin kuat dengan adanya dukungan dari rakyat Palestina yang cukup dominan, sehingga mampu dijadikan modal oleh Hamis untuk memperkuat basis kekuatan pergerakannya (Menurut Hidayat, 2021 dalam Simanjorang 2023). Hamis memiliki sayap politik yang menyampaikan pesan-pesan bernilai nasional Palestina, meskipun basis ideologinya adalah teologis-Islam, konservatif, dan fundamentalis. Hamis menganggap perjuangan nasional sebagai bagian dari jihad Islam melawan Israel, menegaskan bahwa tanah Palestina adalah tanah suci yang tidak boleh diserahkan (Schwartz, 2021).

Menurut Bayquni dkk, 2023 dalam tahun-tahun berikutnya, rakyat Palestina mengadopsi metode perlawanan baru melalui Intifada 1987 sehingga gerakan politik Hamis di Palestina mulai dikenal pada saat terjadi gerakan Intifada (protes) yang terpicu oleh tewasnya beberapa rakyat Palestina dalam tragedi angkutan umum yang ditabrak truk Israel. Para petinggi al- Mujamma' al Islam berkumpul di rumah Syaikh Ahmad Yassin. Hadir antara lain: Abdulazi al-Rantissi, Ibrahim al-Yazuri, Syaikh Salih Syihada, Isa Nashshar, Muhammad Sam'a dan Abdulfattah Dukhan. Hamis yang bercita-cita untuk mendirikan sebuah negara Islam Palestina yang merdeka berdaulat, memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan Palestina dalam kerangka “Pan Islamisme” yang artinya seluruh umat islam di dunia harus terlibat dalam melawan kekuatan zionisme.

Pada tahun 1993, kesepakatan antara Israel dan Palestina dicapai di Oslo, Norwegia, yang memungkinkan PLO mendirikan kantor di Tepi Barat dan Jalur Gaza untuk membentuk Otoritas Nasional Palestina. Negosiasi ini dimulai sebagai respons terhadap Intifada Pertama (1987-1993), Perjanjian Oslo bertujuan untuk membangun kerangka kerja bagi pemerintahan sendiri Palestina, dengan Israel secara bertahap menarik diri dari beberapa wilayah pendudukan. Menurut Bayquni dkk, 2023 Namun, perjanjian ini tidak memberikan jalur yang jelas menuju negara Palestina yang merdeka sehingga sebuah pemberontakan besar Palestina melawan pendudukan Israel. Kegagalan penindasan militer membuat Israel mempertimbangkan keterlibatan diplomatik dengan PLO Hamis dan Jihad Islam menolak perjanjian ini. Setelah Palestine Liberation Organization yang diwakili oleh Fattah Yasir Arafat ditolak Israel pada 1993, Hamis semakin terlihat dengan perjuangannya melalui angkat senjata. Hamis kemudian tidak sekadar berjuang dengan berperang, tetapi juga melakukan kerja sosial.

Hal inilah yang membuat masyarakat Palestina semakin simpati dengan mereka. Kelompok ini kemudian menjadi partai politik dan memenangi Pemilu 2006. Menurut Ilin (2023), dengan kemampuan menyelesaikan masalah sosial pada 2006, organisasi ini berupaya keras mengubah citranya. Hamis menggantikan citra radikal militan dengan citra kekuatan politik yang konstruktif, meskipun perubahan ini tidak membuat politisi Israel merasa lebih aman.

### **Strategi Perlawanan Hamis**

Hamis sering dianggap sebagai simbol perlawanan rakyat palestina terhadap penduduk Israel. Hamis memainkan peran utama dalam perlawanan terhadap Israel dengan berbagai strategi, baik melalui diplomasi maupun dengan kekuatan militer. Salah satu strategi Hamis dalam perlawanannya yaitu dengan menggunakan strategi bersenjata yang bertujuan untuk melawan kedudukan Israel di wilayah Palestina, terutama di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Tujuan utama perlawanan Hamis bukan hanya untuk mengalahkan Israel secara fisik, tetapi juga menentang kedudukan Israel di Palestina dan membuatnya sulit dipertahankan (Ahmad, A., 2023).

Hamis memiliki hubungan kompleks dengan komunitas internasional. Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Israel, dan Uni Eropa telah menetapkan Hamis sebagai organisasi teroris karena taktik yang digunakannya. Namun beberapa negara, terutama negara yang mayoritasnya muslim, menganggap Hamis sebagai gerakan perlawanan yang sah terhadap dominasi Israel di palestina. Hamis

dianggap oleh rakyat Palestina sebagai kekuatan yang mampu menentang dan melawan kekuatan militer Israel. Meskipun secara militer Hamas tidak cukup kuat untuk benar-benar menghancurkan kedudukan pasukan Israel, tetapi perlawanan bersenjata Hamas tetap memiliki dampak yang signifikan.

Salah satu strategi perlawanan Hamas yang paling menonjol adalah perang gerilya yang digunakan Hamas sebagai upaya untuk menghadapi keunggulan militer Israel. Hamas mengadopsi perang gerilya modern yang menggabungkan mobilitas, kejutan, perang psikologis serta propaganda di media sosial untuk melawan kekuatan militer Israel yang lebih unggul (Mekhanet, Y., & Belferd, L. 2024). Selain itu taktik Hamas lainnya yaitu dengan membangun jaringan terowongan bawah tanah yang luas dan panjang untuk menyimpan senjata, menyembunyikan pasukan, serta melakukan serangan mendadak terhadap tentara Israel. Taktik ini memberikan keuntungan bagi Hamas dan memungkinkan mereka untuk bergerak dengan aman dan terhindar dari deteksi tentara Israel.

Selain dengan taktik gerilya dan pembuatan terowongan bawah tanah, Hamas juga aktif dalam menggunakan perang psikologis dan propaganda media sosial. Hamas menggunakan media sosial dan *platform* digital lainnya untuk menyebarluaskan pesan perlawanan, membangun citra sebagai pelindung rakyat Palestina, serta menarik simpati dari komunitas Internasional.

Di tengah dominasi militer Israel dan tekanan Internasional, Hamas tidak hanya mengandalkan perlawanan bersenjata tetapi juga strategi diplomasi untuk memastikan keberlanjutannya. Meskipun Hamas dianggap sebagai organisasi teroris oleh beberapa negara, Hamas berupaya membangun hubungan baik dengan negara-negara pendukungnya. Tentunya Hamas tidak beroperasi sendiri, Hamas didukung oleh negara sekutu yaitu Iran dan Qatar yang memberikan dukungan finansial, *logistic*, dan persenjataan untuk Hamas. Selain itu Hamas juga mendapat dukungan dari kelompok lain seperti Hezbollah di Lebanon dan Houthi di Yaman yang melakukan serangan, sehingga memaksa Israel untuk membagi fokus militernya ke beberapa titik konflik sekaligus.

Menurut (Oluwashakin, A., & Aboyade, A. S., 2024) diplomasi yang dilakukan oleh Hamas mencakup upaya mediasi dalam konflik, lobi politik dengan negara-negara dengan mayoritas muslim, serta memanfaatkan dukungan finansial dan logistik dari negara sekutunya. Hamas juga melakukan penekanan terhadap komunitas internasional melalui organisasi-organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Selain itu, Hamas juga melakukan diplomasi menggunakan media untuk membangun opini publik dan memperkuat citra sebagai perwakilan dari perjuangan rakyat Palestina (Manor, I., & Holmes, M. 2018). Dengan kedua strategi ini, Hamas tidak hanya bertahan dari tekanan militer Israel tetapi mendapatkan dukungan politik dan finansial yang memungkinkan untuk tetap menjadi kekuatan utama dalam perlawanan Palestina. Dengan kemampuan Hamas dalam mengelola hubungan diplomasi ini, dapat menentukan perannya dalam dinamika politik di Timur Tengah serta masa depan konflik Israel-Palestina

### **Peran Hamas dalam Diplomasi Internasional**

Hannase, M. (2016) mengemukakan bahwa sebagai organisasi penggerak perlawanan, Hamas tidak hanya terlibat dalam perlawanan bersenjata, tetapi juga aktif terlibat dalam diplomasi politik, baik secara regional maupun internasional. Hamas tidak hanya berfokus pada perlawanan bersenjata terhadap pendudukan Israel, tetapi juga secara aktif terlibat dalam diplomasi internasional untuk mencapai tujuan politiknya. Peran Hamas dalam diplomasi internasional sangat penting dalam upaya mereka untuk mendapatkan pengakuan sebagai perwakilan yang sah dari Palestina di seluruh dunia. Dalam konteks ini, upaya penghentian konflik Gaza harus diikuti dengan penguatan diplomasi untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina di tanah airnya sendiri. Peran diplomasi dalam mencapai tujuan politik Hamas, sejalan dengan pernyataan bahwa mereka tidak hanya fokus pada perlawanan bersenjata tetapi juga aktif dalam diplomasi.

Muslifah, S. (2023) Mengemukakan Hamas telah mengembangkan hubungan dengan berbagai negara dan organisasi nasional tetapi sering terhambat oleh statusnya sebagai organisasi teroris di mata

banyak negara barat, namun demikian Hamas telah menetapkan aliansi strategis dengan negara-negara bertentangan dengan Israel, Iran dan telah menerima dukungan dari berbagai negara Arab komunitas internasional. Dalam beberapa tahun terakhir Hamas telah berusaha mengambil bagian dalam proses negosiasi damai akan tetapi ada pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan otoritas Palestina yang lebih ringan hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan bagaimana kebijakan luar negeri Hamas dalam mempengaruhi resolusi konflik dan stabilitas regional.

Bochtler (2024) menyatakan bahwa Hamas telah menjalin hubungan erat dengan Iran, yang menyediakan dukungan finansial dan militer untuk memperkuat perlawanan terhadap Israel. Aliansi ini memungkinkan Hamas untuk mempertahankan kapasitas militernya meskipun menghadapi tekanan internasional. Hubungan antara Hamas dan Iran telah berlangsung selama beberapa dekade, dengan Iran secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap perjuangan Hamas melawan Israel, dukungan ini diberikan karena beberapa alasan strategis.

Ketegangan Ideologi Hamas sebagai kelompok Sunni kadang-kadang mengalami ketegangan dengan Iran yang mayoritas Syiah, terutama dalam dinamika politik internal Palestina. Dinamika Regional seperti negara-negara Arab, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, semakin menormalisasi hubungan dengan Israel, maka Iran mungkin akan semakin mengandalkan Hamas sebagai alat politiknya. Sanksi Internasional, tekanan ekonomi dan sanksi internasional terhadap Iran dapat membatasi bantuan finansial dan militer yang diberikan kepada Hamas. Hubungan antara Hamas dan Iran merupakan strategi pragmatis yang saling menguntungkan. Hamas mendapatkan dukungan finansial dan militer untuk terus melawan Israel, sementara Iran menggunakan Hamas sebagai bagian dari strategi melemahkan pengaruh Israel di kawasan Timur Tengah. Namun, hubungan ini juga memperumit konflik di Gaza, meningkatkan ketegangan regional, dan memperburuk situasi kemanusiaan di Palestina.

Lederer (2023) menyatakan bahwa hubungan antara Hamas dan Iran memainkan peran penting dalam konflik di Timur Tengah. Iran telah secara terbuka mengakui bahwa mereka mendukung Hamas, bukan hanya dalam konteks perjuangan Palestina, tetapi juga sebagai bagian dari strategi geopolitik yang lebih luas untuk menantang pengaruh Israel dan sekutu-sekutunya di kawasan Palestina. Iran telah lama menjadi salah satu pendukung utama kelompok-kelompok yang menentang Israel, termasuk Hamas dan Hizbullah di Lebanon. Hubungan ini didasarkan pada kepentingan strategis Iran untuk melemahkan Israel dan meningkatkan pengaruhnya di Timur Tengah. Meskipun Hamas adalah kelompok Sunni, sementara Iran mayoritas Syiah, kerja sama mereka didorong oleh tujuan bersama untuk menghadapi Israel, adapun dukungan finansial Iran menyediakan jutaan dolar setiap tahun untuk mendukung operasional Hamas di Gaza kemudian ada dukungan militer Iran memasok senjata, roket, dan teknologi rudal kepada Hamas untuk digunakan dalam serangan terhadap Israel.

### **Konflik Internal HAMAS dengan Fatah dan PLO**

Konflik internal antara Hamas, Fatah, dan PLO (*Program Learning Outcomes*) merupakan salah satu dinamika utama dalam politik Palestina yang berdampak pada perjuangan kemerdekaannya. Kelompok-kelompok yang lahir karena kondisi penjajahan di Palestina tersebut yaitu Fatah dan Hamas (Santi, 2020). Meskipun sebelumnya telah ada *Program Learning Outcomes* (PLO) sebagai wadah perjuangan, namun pembentukan Fatah dan Hamas dilatarbelakangi atas dasar ketidakpuasan terhadap berbagai macam bentuk perjuangan yang sudah dilakukan sebelumnya. Kedua gerakan perlawanan dan partai politik yang paling dominan di Palestina ini justru sering terlibat konflik internal, sedangkan keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Palestina.

Konflik ini berakar pada perbedaan ideologi, strategi perlawanan, serta perebutan kekuasaan politik di wilayah Palestina, terutama di Jalur Gaza dan Tepi Barat yang menjadi pemicu utama ketegangan di antara kelompok-kelompok ini. Perbedaan ideologi bukan penyebab utama dan satu-satunya dari perpecahan antara Hamas dengan Fatah sehingga keduanya tidak berjalan beringan dan melakukan kerja sama. (Santi, 2020) menemukan ada beberapa penyebab lainnya, yaitu: (1) Perbedaan

cara dalam usaha untuk memerdekakan Palestina, Hamas memilih bergerilya dengan mengangkat senjata, sedangkan Fatah yang bergabung dengan PLO lebih memilih jalur diplomasi dan meninggalkan perjuangan melalui kekuatan militer untuk mengusir Israel, (2) isu korupsi dan penyelewengan kekuasaan yang menyerpa Fatah setelah menandatangani kesepakatan Deklarasi Oslo II (Burdah, 2008), (3) kesepakatan yang ditanda tangani oleh Fatah dan Israel pada Deklarasi Oslo dianggap oleh Hamas sebagai pengakuan Palestina terhadap Israel yang mana bertentangan dengan pendirian Hamas

Pada awalnya Fatah dan Hamas sama-sama berjuang dengan cara politik maupun senjata. Namun sejak Perjanjian Oslo 1993, Fatah berhenti angkat senjata terhadap Israel, sedangkan Hamas masih terus mengaktifkan sayap militernya, yaitu Brigade Izzuddin Al Qasam (Hafizh et al., 2024). Dapat disimpulkan bahwa sebelumnya Fatah dan PLO angkat senjata melawan Israel, namun pasca-Oslo 1993, mereka memutuskan untuk tidak lagi melakukan perlawanan bersenjata. Sebaliknya, Hamas sejak awal menolak Perjanjian Oslo, dan tetap memilih jalur perlawanan bersenjata.

Selain perbedaan ideologi dan strategi, konflik ini juga dipicu oleh persaingan politik. Pada Januari 2006, Pemilu Legislatif Palestina menandai babak baru dalam sejarah politik Palestina. Namun sebelum tahun 2006, Otoritas Palestina dikendalikan oleh anggota PLO dan Fatah. Otoritas Palestina adalah entitas politik semi-otonom yang menguasai populasi Palestina di Yudea, Samaria, dan Jalur Gaza. Pada Januari 2006, pemilihan diadakan untuk Dewan Legislatif Palestina (PLC), di mana sebelumnya sebagian besar kursi dewan dikuasai oleh PLO dan Fatah. Untuk pertama kalinya, saingan utama mereka, Hamas, ikut serta dalam pemilihan tersebut (Schwartz & Galily, 2021). Hamas melalui manifesto yang menekankan isu-isu seperti korupsi, pengangguran, dan keamanan, kini berhasil memenangkan mayoritas kursi dan mengakhiri dominasi panjang Fatah selama hampir setengah abad pada kursi kepemimpinan Palestina.

Pemilu ini menghasilkan kemenangan besar bagi Hamas, yang berhasil meraih 76 dari 132 kursi di parlemen Palestina. Kemenangan ini mengubah dinamika politik di Palestina, karena Hamas yang sebelumnya lebih dikenal sebagai kelompok perlawanan bersenjata, kini memperoleh legitimasi politik yang signifikan. Hamas memenangkan pemilu tidak hanya karena militansinya, tetapi juga karena kampanye yang terorganisir dengan baik serta citra sebagai kekuatan politik yang mampu menangani isu sosial di Palestina. Namun, kemenangan ini juga memperdalam konflik internal dengan Fatah, yang menolak mengakui pemerintahan Hamas dan justru mendorong isolasi internasional terhadap kelompok tersebut (Dobayev et al., 2020).

Setelah Hamas berhasil memenangkan kursi Parlemen pada tahun 2006, dominasi Fatah di parlemen menjadi turun, setelah itu sering terjadi konflik antara Hamas dan Fatah. Namun, kemenangan ini tidak diterima oleh Fatah dan PLO, yang menganggap Hamas sebagai ancaman terhadap dominasi mereka dalam pemerintahan Palestina. Setelah pemilihan umum 2006, terjadi perpecahan politik antara Fatah yang menguasai PA di Tepi Barat dan Hamas yang menguasai Gaza, menyebabkan dualisme pemerintahan yang menciptakan tantangan besar dalam konsolidasi kekuasaan dan efektivitas pemerintahan (Hamdi et al., 2024).

(Mahmoudian, 2023) berpendapat bahwa setelah Israel menarik diri dari Gaza pada tahun 2005, Otoritas Palestina, yang didominasi oleh Fatah, diharapkan untuk mengambil alih pemerintahan di wilayah tersebut. Namun, karena adanya tuduhan korupsi terhadap Fatah dan persepsi kedekatan mereka dengan Israel, Hamas berhasil memenangkan pemilu legislatif Palestina pada tahun 2006. Kemenangan ini menyebabkan perpecahan politik yang mendalam, dengan Fatah mempertahankan kendali di Tepi Barat sementara Hamas mengambil alih Gaza melalui pertempuran bersenjata pada tahun 2007.

Ketegangan antara kedua faksi akhirnya memuncak menjadi konflik bersenjata pada tahun 2007. Bentrokan antara pasukan keamanan Fatah dan Hamas terjadi di berbagai wilayah Palestina, terutama di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Pada bulan Juni 2007, Hamas melakukan serangan besar-besaran terhadap pasukan Fatah di Gaza dan berhasil mengambil alih kendali penuh atas wilayah tersebut. Hamas mengambil alih kendali Gaza, sementara Fatah tetap memegang kekuasaan di Tepi Barat. Sejak

saat itu, Palestina tetap terbagi antara dua pemerintahan yang bersaing, yang semakin memperumit upaya untuk mencapai solusi politik yang stabil. Perpecahan ini melemahkan perjuangan Palestina secara keseluruhan, karena kedua faksi lebih sering terlibat dalam konflik internal daripada bersatu melawan pendudukan Israel (T Abumbe et al., 2024).

### **Evaluasi Keberhasilan dan Tantangan Hamas**

Sejak didirikan pada tahun 1987, Hamas telah menjadi salah satu peran utama dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, baik dalam aspek militer, sosial, maupun politik. Hamas berhasil membangun sistem pemerintahan di Gaza usai memenangkan pemilu pada tahun 2006, menunjukkan kemampuannya dalam mengelola wilayah dan mampu memberikan layanan sosial bagi warga Palestina. Selain itu, Hamas mampu mempertahankan perlawanan terhadap Israel meskipun menghadapi tekanan militer yang besar, termasuk blokade dan serangan berulang dari Israel. (Hammaduddin, et al. 2021)

Akan tetapi, meskipun Hamas memiliki dukungan yang cukup besar di Gaza dan meraih keberhasilan militer, Hamas masih mengalami tantangan besar baik dari dalam maupun dalam negeri. Blokade yang diberlakukan oleh Israel dan pengurangan bantuan internasional telah menyebabkan krisis ekonomi di Gaza, sehingga berakibat meningkatnya tingkat pengangguran, dan memperburuk kondisi kehidupan rakyat Palestina. Gaza juga mengalami kehancuran yang besar, yaitu banyak ribuan korban sipil akibat serangan Israel. (Oluwashakin, 2024).

Tidak pantang menyerah, Hamas melakukan beberapa penyerangan kepada Israel untuk mempertahankan Palestina, yaitu menurut beberapa laporan media, Hamas menyelundupkan pesawat tak berawak untuk menyerang fasilitas-fasilitas Israel. Namun, Israel tidak diam begitu saja, mereka telah mengambil tindakan pencegahan terhadap strategi yang dilakukan Hamas yaitu membunuh 2 orang pembuat pesawat tak bersayap tersebut di Tunisia dan Malaysia (BBC, 2018). Selain itu, Hamas juga tidak mudah mengakses senjata atau taktik tabrak lari, karena dikepung oleh Israel dan Mesir. Tidak heran bila orang-orang Palestina-lah yang paling banyak menderita dan menjadi korban jiwa. Terlepas dari permasalahan tersebut, para petinggi Hamas masih percaya diri dengan kemampuan dan kekuatan militer yang mereka miliki. Mereka juga berpikir bahwa Hamas lebih kuat karena sudah berperang beberapa kali dengan Israel. (Uslu, N., et al. 2020)

Sejak tahun 2014, Hamas telah siap menghadapi kemungkinan perang yang akan terjadi, karena telah belajar menggunakan senjata pesawat tak berawak dan mampu memproduksi kapal selam dan roket melalui bantuan rekayasa para ahli. Selain itu, Hamas dengan kelompok bersenjataanya itu berhasil memaksa Israel untuk membebaskan 1.000 tahanan Palestina (Reyes, 2025). Mereka juga berpendapat bahwa atas perlawanan Hamas-lah yang menjadikan Israel menarik diri dari jalur Gaza. Hamas percaya bahwa dengan perlawanan yang intensif kepada Israel, Israel akan mundur. Kemungkinan besar Hamas akan terus melakukan perlawanan, seperti yang diperkirakan oleh beberapa cendekiawan.

Meskipun Hamas menghadapi berbagai tantangan, seperti yang sudah disebutkan di atas, Hamas tetap berupaya untuk memperkuat posisinya baik secara militer maupun politik. Di satu sisi, Hamas terus mengembangkan teknologi persenjataan, termasuk pembuatan roket, drone, dan kapal selam yang digunakan untuk operasi bawah laut. Di sisi lain, Hamas juga berupaya membangun hubungan dengan negara-negara yang bersimpati terhadap perjuangan Palestina, seperti Iran, Turki, dan Qatar, yang memberikan dukungan ekonomi dan militer. Namun, perjuangan dan upaya Hamas dalam mencari dukungan global tetap mengalami hambatan, terutama karena banyak negara-negara yang menganggapnya sebagai organisasi teroris, sehingga membatasi jalur diplomasi mereka di jalur internasional. Dengan kondisi yang seperti ini, tentu saja Hamas menghadapi dilema antara mempertahankan strategi perlawanan bersenjata atau mengadopsi pendekatan politik yang lebih moderat demi mengurangi isolasi internasional dan meningkatkan legitimasi pemerintahan mereka di Gaza (Balal, 2022). Menurut Warikat (2021) mengemukakan bahwa perdamaian menyuluruh antara

Israel dan Palestina sulit dicapai, namun gencatan senjata jangka panjang (Hudna) merupakan opsi yang lebih realistis untuk dilakukan.

### KESIMPULAN

Hamis memiliki peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan palestina. Hamis memiliki 2 jalur strategi utama, yakni perlawanan bersenjata dan diplomasi. Dalam perlawanannya hamis mengadopsi strategi perang gerilya, membuat jaringan terowongan, dan propaganda media. Selain itu, Hamis juga berupaya membangun hubungan diplomasi dengan negara-negara sekutunya. Namun dalam perlawanannya, Hamis memiliki hambatan internal dengan Fatah dan PLO yang semakin memperumit situasi, menciptakan perpecahan politik yang dapat melemahkan perjuangan Palestina.

Meskipun Hamis mendapatkan dukungan dari masyarakat Palestina, keberadaannya tetap menjadi kontroversi di komunitas internasional. Beberapa negara menganggapnya sebagai organisasi teroris, sementara yang lain melihatnya sebagai pejuang kemerdekaan Palestina.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abumbe, G. T., Terhile, A., & Helen, D. C. (2024). Hamas-Israel Conflicts In Gaza and Its Implications For Middle East Stability. *Global Journal of Social Sciences*, 23(1), 157-178.
- Ahmad, A. (2023). Land for peace? Game theory and the strategic impediments to a resolution in Israel-Palestine. *Defence and Peace Economics*, 34(4), 385-409.
- Ak, G. (2024). "Crime of the Century": Israel's State Terrorism and International Law Violations in Gaza Strip. *Journal of Humanity, Peace and Justice*, 1(1), 65-95.
- Alianita, M., & Zulfa, E. A. (2023). Palestinian-Israeli Conflict In War and Peace Approach. *International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences (IJAMESC)*, 1(6), 845-850.
- Awwad, H. (2020). Understanding Hamas: Remarks on Three Different and Interrelated Theoretical Approaches. *Siyasat Arabiya*, 8(45), 24-44.
- Balal Ali. (2022). Hamas in Power. *International Journal of Interdisciplinary Research and Innovations*, 10 (3), 14-23.
- BBC. 2018. Palestian Lecturer and Hamas Member Killed in Malaysia, diakses 9 Maret 2025 dari <https://www.bbc.com/news/world-asia-43851065>
- Bochtler, L. (2024). Building Trust, Communication and Negotiating in the Current War Between Israel and Hamas. *Applied Psychology Around The World*, 63.
- Dobayev, A., Dobayev, I., Ignatova, T., & Operations, C. F. O. F. (2020). The Moslem World: Theoretical and Philosophical Problems. *The Moslem World*.
- Faeq, N., & Jahnata, D. (2020). The Historical Antecedents of Hamas. *International Journal of Social Science Research and Review*, 3(3), 26-35.
- Hamdi, Z., Nurwahidin, N., Hannase, M., & Lubis, A. B. U. (2024). Sistem Pemerintahan dan Pranata Politik Timur Tengah. *Jurnal ICMES*, 8(2), 172-195.
- Hammaduddin, H., Umer, N., & Dashti, Z. H. (2021). Analysing The Efforts Of Hamas For The Palestinian Cause. *Pakistan Journal of International Affairs*, 4(4), 836-853
- Hannase, M. (2016). Respon Muslim Indonesia Terhadap Gerakan Islamisme Di Timur Tengah: Kasus Hamas Dan Konflik Palestina. *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat*, 12(2), 161-18
- Jazuli, A., Ediyono, S., Malik, A., Ahmad, A. A. H., & Muslifah, S. (2023). The Hegemony of Hamas and Its Impact on The Social Behavior of The Palestinian Society. *Center of Middle Eastern Studies (CMES)*, 16(1), 73-82.
- Mahmoudian, A. (2023). Israel-Hamas Conflict: Operational Considerations and Strategy.
- Manor, I., & Holmes, M. (2018). Palestine in Hebrew: Overcoming the limitations of traditional

- diplomacy. *Revista Mexicana de Política Exterior*, (113), 1-17.
- Mekhanet, Y., & Belferd, L. (2024). Modern Guerrilla Warfare: An Analysis of Hamas' Tactics in the Palestinian-Israeli Ongoing Conflict. *Social Studies and Research Journal* 3(12).
- Mudore, S. B. (2019). Peran Diplomasi Indonesia Dalam Konflik Israel-Palestina. *Center of Middle Eastern Studies (CMES)*, 12(2), 170-181.
- Oluwashakin, A., & Aboyade, A. S. (2024). A Critical Assessment of Israel-Hamas War in the Israel-Palestine Conflict. *Journal of Contemporary International Relations and Diplomacy*, 5(1), 102–120.
- Rahman, B. J. (2020). Hamas dan Fatah: Tekanan ideologi dalam membebaskan Palestina. *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 1(2), 81-92.
- Sari, B. (2020). Hamas, The Islamic Wing of Palestinian Resistance: Its Roots, Characteristics, and Way of Politics. *Liberal Düşünce Dergisi*, 25(97), 147-165.
- Schwartz, D., & Galily, D. (2021). The Hamas Movement: Ideology vs. Pragmatism. *Open Journal for Studies in History*, 4(2).
- Simanjourang, B. M., dkk. (2023). Pengaruh Konflik Palestina dengan Israel terhadap Gerakan Perlawanan Hamas dan Dampaknya Bagi Indonesia. *Mediation: Journal of Law*, 24-30.
- Sudantha, M. H. S., & Sidik, H. (2024). Perjuangan Kemerdekaan Palestina. *Jurnal ICMES*, 8(2), 196-216.
- Uslu, N., & Karataş, İ. (2020). Evaluating Hamas' Struggle in Palestine. *Insight Turkey*, 22(1), 109-124.